

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Totalmedia.
- Chazawi, Adam. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewantoro, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- Efendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fakhriah, Efa Laila. 2009. *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHPA: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- M. Arief Mansur, Didik dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun, Rocky dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi ke-3*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan ke-2*. Yogyakarta: Penerbit Amarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prints, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputat: PT. Tatanusa.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soejono dan Abdurahman, H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetarna, Hendar Soetarna. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sofyan, Andi dan Abd, Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tanusubroto, S. 1948. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Amirco.
- Taufik Makarao, Mohammad. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrech, E. dan Saleh Djindang, Moch. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, J. Pajar. 2018. *Menjadi Hakim Progresif*. Lampung: Indepth Publishing.

#### **Jurnal:**

- Abraham, William dan Hery Firmansyah. “*Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk*”. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanagara. Jakarta.
- Astuti, Sri Ayu. 2017. “*Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace)*”. Pagaruyuang Law Journal. Volume 1 Nomor 1.
- Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, dan Mujibussalim. 2013. *Jurnal Ilmu Hukum: “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana”*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Volume 1 Nomor 4.
- Isma, Nur Laili dan Arima Komiyatun. 2015. “*Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta. Volume 1 Nomor 2.
- Handoko, Cahyo. “*Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Cyber Crime di Pengadilan*”. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Harizona, Daus. 2018. “*Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)*”. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*. Volume 7 Nomor 1.
- Kaligis, Jendry. 2013. “*Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan*”. *Jurnal Lex Crimen*. Volume II Nomor 4.
- Ramiyanto. “*Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 6 Nomor 3.
- Ramli, Ahmad M. 2008. “*Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 5 Nomor 4.
- Surjono, Herman Dwi. 1996. “*Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*”. Pendidikan Teknik Informatika. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Zega, Ingrid Gratsya. 2012. “*Tinjauan mengenai Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) sebagai Alat Bukti dalam Kasus Dugaan Kartel Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan di Indonesia*”. Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

#### **Internet:**

*Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. <http://po-box2000.blogspot.com/2012/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020. Pukul 13.30 WIB.

- Hukum Online, *Arti Alat Bukti Tidak Langsung*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5a824ec03c369/arti-alat-bukti-tidak-langsung/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020. Pukul 15.01 WIB.
- Hukum Online. *Berjuang Mencari Legitimasi Indirect Evidence*.  
<https://www.ucnews.id/news/Berjuang-Mencari-Legitimasi-Indirect-Evidence/2099612943090568.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020. Pukul 11.29 WIB.
- Hukum Online. *Alat Bukti Rekaman*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c16915/alat-bukti-rekaman>, diakses pada tanggal 9 September 2020. Pukul 01.15 WIB.
- Hukum Online. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*.  
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/#_ftn2), diakses pada tanggal 9 September 2020. Pukul 16.30 WIB.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **Putusan:**

- Putusan Nomor: 56/Pid.B/2020/PN.Pkb.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.